

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LKJIP) TAHUN 2024

**Dinas Perindustrian Tenaga Kerja
Kota Pekalongan**

(0285) 421731

Jl. Majapahit No 14 Kota Pekalongan
dinperinaker.pekalongankota.go.id



**DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
KOTA PEKALONGAN**

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Dinperinaker) dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2024, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (good governance dan clean government) telah mendorong pengembangan dan penerapan system pertanggung-jawaban yang jelas, tepat, teratur dan efektif yang dikenal dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penerapan sistem tersebut bertujuan agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bertanggungjawab dan bebas dari praktek-praktek kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN).

Dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini kami telah berupaya secara maksimal dan optimal agar sesuai dengan ketentuan serta kaidah-kaidah yang diamanatkan dalam peraturan diatas, namun demikian kami menyadari bahwa belum sepenuhnya laporan ini dapat memenuhi harapan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu dengan kelapangan hati kami siap menerima masukan dan saran yang membangun demi perbaikan dan penyempurnaan penyusunan laporan kinerja pada tahun mendatang.

Pekalongan, 12 Februari 2025
Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Kota Pekalongan


BETTY DAHLAN DAHLAN, S.T.
Pejabat Utama Muda
NIP. 19690203 199803 2 004



**DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
KOTA PEKALONGAN**

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2024 menyajikan capaian kinerja atas Perjanjian Kinerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Pekalongan Tahun 2024. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja pada tahun 2024 memiliki 3 (tiga) sasaran strategis dengan total 3 (tiga) indikator kinerja, dan 3 (tiga) target kinerja yang harus dicapai.

Secara umum penyelenggaraan pemerintahan di Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja pada tahun 2024 dapat dikatakan **Sangat Berhasil**. Capaian kinerja pemerintahan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja ini didasarkan pada hasil pengukuran kinerja sasaran yang dicapai melalui pelaksanaan berbagai kebijakan, program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2024.

Selanjutnya hasil analisis terhadap 3 (tiga) sasaran strategis yang dijadikan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, adalah sebagai berikut:

1. Indikator Nilai SAKIP OPD target yang ditetapkan 75,00.

Berdasarkan penilaian SAKIP yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Pekalongan, bahwa untuk penilaian Tahun 2024 nilai SAKIP Dinperinaker 75,45 dengan katagori BB predikat Sangat Baik. Sehingga capaian untuk indikator nilai AKIP sebesar 100,60%.

2. Indikator Persentase tenaga siap pakai yang ditempatkan target yang ditetapkan 52,29%.

Berdasarkan Capaian yang diperoleh oleh Dinperinaker Kota Pekalongan, bahwa Tahun 2024 mencapai 56,82%. Sehingga capaian untuk indikator Persentase tenaga siap pakai yang ditempatkan dari target yang ditetapkan sebesar 108,66%.

3. Indikator Pertumbuhan Industri target yang ditetapkan 0,085%.

Berdasarkan realese yang dilaksanakan oleh BPS Kota Pekalongan, bahwa untuk Tahun 2024 angka untuk Pertumbuhan Industri belum realese. Sehingga capaian untuk indikator Pertumbuhan Industri belum dapat disajikan.

Kinerja keuangan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2024 menunjukkan realisasi sebesar Rp. 11.580.574.743,00,- atau 90,23% dari total pagu anggaran sebesar Rp. 12.834.945.000,00,-.



**DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
KOTA PEKALONGAN**

Capaian kinerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Pekalongan diharapkan dapat terus meningkat dari tahun ke tahun. Untuk itu diperlukan upaya bersama untuk dapat mewujudkan harapan tersebut.



**DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
KOTA PEKALONGAN**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

KATA PENGANTAR	2
IKHTISAR EKSEKUTIF	3
DAFTAR ISI	5
BAB I PENDAHULUAN	6
1.1. LATAR BELAKANG	6
1.2. GAMBARAN UMUM ORGANISASI	7
1.3. KONDISI APARATUR	16
1.4. ISU STRATEGIS	18
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	20
2.1 RENCANA STRATEGIS 2021 – 2026	20
2.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021 – 2026	25
2.3. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024	26
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	29
3.1 PENGUKURAN KINERJA	29
3.2 EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA	33
3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN	48
3.4 PRESTASI YANG DIRAIH	53
BAB IV PENUTUP	57

LAMPIRAN

Indikator Kinerja Utama Perubahan Tahun 2021 - 2026
Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Dinperinaker) selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Pekalongan, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).



DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KOTA PEKALONGAN

Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Pekalongan diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Pekalongan Tahun 2024 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

1.2. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Pekalongan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2020 Nomor 3) yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja. Dinperinaker merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang perindustrian dan bidang tenaga kerja.

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Kedudukan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja. Dinperinaker merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam bidang perindustrian dan bidang tenaga kerja, yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban tersebut Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Pekalongan mempunyai fungsi :

- a. perumusan dan penetapan sasaran, program bidang Perindustrian dan Tenaga Kerja;
- b. perumusan kebijakan Bidang Perindustrian dan Tenaga kerja;
- c. pengkoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang Kesekretariatan;
- d. pengkoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang penempatan tenaga kerja, pelatihan kerja dan produktifitas tenaga kerja;
- e. pengkoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang hubungan industrial dan jaminan sosial;
- f. pengkoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang perindustrian;



DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KOTA PEKALONGAN

- g. Pengarahan dan pengkoordinasian pelaksanaan dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan / atau Standar Pelayanan (SP);
- h. Pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan, pembinaan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan tugas; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur organisasi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Dinperinaker) Kota Pekalongan terdiri dari Kepala Dinperinaker yang memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, dan membawahi Sekretariat, Bidang Industri, Bidang Penempatan Kerja, Pelatihan dan Produktifitas, dan Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial, UPTD, dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pejabat struktural sebagaimana terdapat dalam struktur organisasi dibawah ini :

Susunan Organisasi Dinperinaker Kota Pekalongan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat
 - 1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan; dan
 - 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Penempatan Kerja, Pelatihan dan Produktivitas;
- d. Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial;
- e. Bidang Perindustrian;
- f. UPTD (BLK); dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sebagaimana Struktur organisasi Dinperinaker Kota Pekalongan, masing-masing unsur memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

1. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian, pengoordinasian rencana program, kegiatan, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja serta administrasi keuangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan sasaran, program dan kegiatan dinas;



**DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
KOTA PEKALONGAN**

- b. pengoordinasian penyusunan kebijakan dinas;
- c. pengoordinasian perencanaan dan pelaksanaan kegiatan bidang-bidang;
- d. pengoordinasian penyusunan laporan dan evaluasi capaian kinerja, sasaran, program dan kegiatan;
- e. pembinaan pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, ketatausahaan, kepegawaian, kehumasan, pengelolaan barang milik daerah, bahan kerjasama, sarana prasarana teknologi informasi, perpustakaan dan kearsipan;
- f. pengoordinasian pengelolaan, penatausahaan dan pelaporan bidang keuangan;
- g. pengoordinasian pengelolaan data dan informasi;
- h. pengoordinasian penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- i. pengoordinasian penyusunan, pelaksanaan dan pengevaluasian Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (SP);
- j. pengoordinasian pelaporan Analisis Jabatan (ANJAB), Analisis Beban Kerja (ABK) dan Evaluasi Jabatan (EVJAB);
- k. pengendalian, pembinaan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang, tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri dari 2 (dua) sub bagian yaitu Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan dan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, dengan tugas :

- (1) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan mempunyai tugas :

- (2) menyusun rencana kerja di bidang perencanaan, evaluasi dan keuangan;
- (3) menyusun bahan dan melaksanakan koordinasi perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
- (4) menyusun bahan dan melaksanakan koordinasi evaluasi capaian program, kegiatan dan anggaran;
- (5) menyusun bahan dan melaksanakan koordinasi pelaporan capaian kinerja;
- (6) melaksanakan verifikasi pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan;



**DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
KOTA PEKALONGAN**

- (7) melaksanakan fungsi akuntansi;
- (8) menyusun bahan dan pengoordinasian laporan keuangan;
- (9) menyusun bahan profil perangkat daerah;
- (10) mengelola data dan informasi;
- (11) menyusun bahan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- (12) menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya; dan
- (13) mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan.
- (14) Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja di bidang administrasi umum dan kepegawaian;
- b. melaksanakan dan mengelola kegiatan administrasi umum meliputi ketatausahaan, kepegawaian, kehumasan, pengelolaan barang milik daerah, bahan kerjasama, sarana prasarana teknologi informasi, perpustakaan dan kearsipan;
- c. melaksanakan kegiatan tata kelola barang milik daerah meliputi pengadaan, pencatatan, pemeliharaan, penghapusan dan pelaporan barang milik daerah;
- d. melaksanakan pengelolaan, pengembangan dan pembinaan kepegawaian;
- e. menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya;
- f. mengelola dan menyusun laporan Analisis Jabatan (ANJAB), Analisis Beban Kerja (ABK) dan Evaluasi Jabatan (EVJAB); dan
- g. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan.

2. Bidang Penempatan Kerja, Pelatihan dan Produktivitas

Bidang Penempatan Kerja, Pelatihan dan Produktivitas dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Penempatan Kerja, Pelatihan dan Produktivitas mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan bahan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang penempatan kerja, pelatihan dan produktivitas kerja.



DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KOTA PEKALONGAN

Untuk melaksanakan tugas Bidang Penempatan Kerja, Pelatihan dan Produktivitas menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan program kerja bidang penempatan tenaga kerja, pelatihan dan produktivitas;
- b. perumusan bahan kebijakan bidang penempatan tenaga kerja, pelatihan dan produktivitas;
- c. pengoordinasian penyusunan rencana tenaga kerja makro dan mikro;
- d. penyelenggaraan pelatihan berdasarkan unit kompetensi;
- e. penyelenggaraan pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta;
- f. penyelenggaraan fasilitasi perizinan dan pendaftaran lembaga pelatihan kerja;
- g. penyelenggaraan konsultasi produktivitas pada perusahaan kecil;
- h. penyelenggaraan pengukuran kompetensi dan produktivitas tenaga kerja;
- i. penyelenggaraan pelayanan antarkerja di daerah;
- j. penyelenggaraan penyuluhan dan bimbingan jabatan bagi pencari kerja;
- k. penyelenggaraan perluasan kesempatan kerja;
- l. penyelenggaraan fasilitasi penerbitan izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS);
- m. penyelenggaraan pengelolaan informasi pasar kerja;
- n. penyelenggaraan perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di daerah;
- o. penyelenggaraan fasilitasi penerbitan perpanjangan IMTA;
- p. perencanaan dan pelaporan pelaksanaan dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya;
- q. pengendalian, pembinaan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
- r. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial

Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan bahan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang hubungan industrial dan jaminan sosial.

Untuk melaksanakan tugas Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial menyelenggarakan fungsi:



DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KOTA PEKALONGAN

- a. perumusan program kerja bidang hubungan industrial dan jaminan sosial;
- b. perumusan bahan kebijakan bidang hubungan industrial dan jaminan sosial;
- c. pengoordinasian pengesahan peraturan perusahaan;
- d. pengoordinasian pendaftaran perjanjian kerjasama;
- e. pengoordinasian penyelenggaraan pendataan dan informasi sarana hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja serta pengupahan;
- f. pengoordinasian pencegahan perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) daerah;
- g. pengoordinasian penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) daerah;
- h. pengoordinasian penyelenggaraan verifikasi dan rekapitulasi keanggotaan pada organisasi pengusaha, federasi dan konfederasi serikat pekerja/ serikat buruh serta non afiliasi;
- i. pengoordinasian pelaksanaan operasional lembaga kerjasama tripartit daerah;
- j. pengoordinasian pengembangan pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja;
- k. perencanaan dan pelaporan pelaksanaan dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya;
- l. pengendalian, pembinaan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Perindustrian

Bidang Perindustrian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Perindustrian mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang perindustrian.

Untuk melaksanakan tugas Bidang Perindustrian menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan program kerja bidang perindustrian;
- b. perumusan bahan kebijakan bidang perindustrian;
- c. penyelenggaraan penyusunan rencana pembangunan industri;



**DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
KOTA PEKALONGAN**

- d. pengoordinasian, sinkronisasi, dan pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan, penyebaran dan perwilayahan industri;
- e. pengoordinasian, sinkronisasi, dan pelaksanaan pembangunan sumber daya industri;
- f. pengoordinasian, sinkronisasi, dan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana industri;
- g. pengoordinasian, sinkronisasi, dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat;
- h. penyelenggaraan penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) kewenangan daerah;
- i. penyelenggaraan penyediaan informasi industri untuk informasi industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI kewenangan daerah;
- j. perencanaan dan pelaporan pelaksanaan dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya;
- k. pengendalian, pembinaan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. UPTD BLK

Susunan Organisasi UPTD BLK terdiri atas:

- a) Kepala;
- b) Subbagian Tata Usaha; dan
- c) Kelompok Jabatan Fungsional (Instruktur).

Tugas dan fungsi UPTD BLK diatur dengan Peraturan Walikota tersendiri.

6. Kelompok Jabatan Fungsional

- a) Pada Dinperinaker dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional.
- b) Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas sesuai jenis dan jenjang jabatannya.
- c) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, atau Jabatan Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.



**DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
KOTA PEKALONGAN**

- d) Pejabat Fungsional yang mendapat tugas tambahan sebagai Sub Koordinator dalam menjalankan tugasnya bekerja secara individu dan/atau tim kerja dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Jabatan Administrator masing-masing.
- e) Sub Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sebagaimana dimaksud pada point (d) mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
- f) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada point (c) diatur oleh Kepala Dinas.

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

Tugas, jenis dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan tugas Kelompok Jabatan Fungsional dan pola hubungan kerja Kelompok Jabatan Fungsional dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

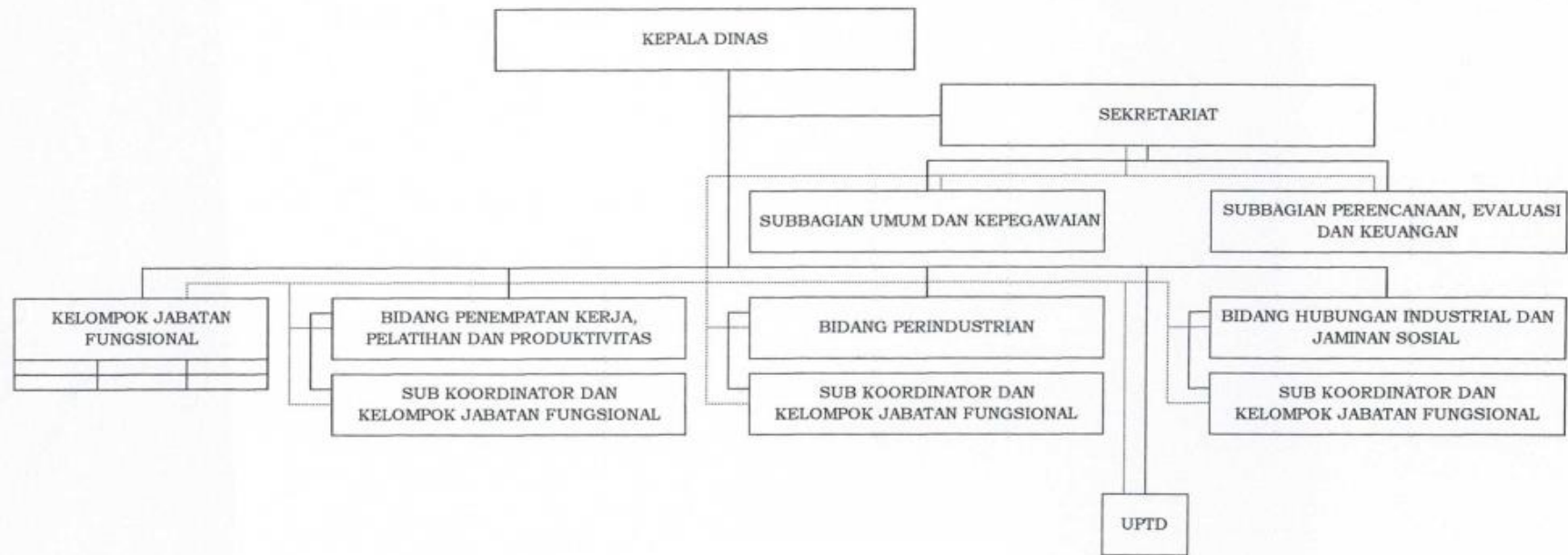


**DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
KOTA PEKALONGAN**

Struktur Organisasi Dinperinaker Kota Pekalongan

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 88 TAHUN 2021
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA



SEKRETARIS DAERAH

SRI RUMININGSIH

WALIKOTA PEKALONGAN

Cap

Ttd

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID



**DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
KOTA PEKALONGAN**

1.3. KONDISI APARATUR

Sumber Daya Manusia Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

**Rekapitulasi Jumlah ASN DINPERINAKER Kota Pekalongan
Menurut Golongan**

No.	Golongan	Jumlah		Prosentase	
		Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2023	Tahun 2024
	PNS				
1	Golongan I	1	1	2,1%	2,2%
2	Golongan II	3	2	6,4%	4,4%
3	Golongan III	32	32	68,1%	71,1%
4	Golongan IV	11	9	23,4%	20,0%
	Jumlah PNS	47	44		
	PPPK				
1	Golongan VII / 2c	0	1	0%	2%
	Jumlah PPPK	0	1		
	Jumlah Total	47	45	100,0%	100,0%

**Rekapitulasi Jumlah ASN DINPERINAKER Kota Pekalongan
Menurut Tingkat Pendidikan**

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah				Prosentase			
		2023		2024		2023		2024	
		PNS	PPPK	PNS	PPPK	PNS	PPPK	PNS	PPPK
1	SD								
2	SLTP	1		1		2,1%		2,2%	
3	SLTA	3		3		6,4%		6,7%	
4	DIPLOMA I								
5	DIPLOMA II								
6	DIPLOMA III	2		2	1	4,3%		4,4%	2,2%
7	DIPLOMA IV	1		1		2,1%		2,2%	
8	S-1	31		28		66,0%		62,2%	
9	S-2	9		9		19,1%		20,0%	
10	S-3								
	Jumlah	47		44	1	100,0%		97,8%	2,2%



**DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
KOTA PEKALONGAN**

**Rekapitulasi Jumlah ASN DINPERINAKER Kota Pekalongan
Berdasarkan Jenis Jabatan**

No	Jenis Jabatan	Jumlah		Prosentase (%)	
		2023	2024	2023	2024
A	Struktural				
1	II.A				
2	II.B	1	1	2,1%	2,2%
3	III.A	1	1	2,1%	2,2%
4	III.B	3	3	6,4%	6,7%
5	IV.A	3	3	6,4%	6,7%
6	IV.B	1	1	2,1%	2,2%
	Jumlah A				
B	Fungsional				
1	JF Penyesuaian Penyederhanaan Birokrasi	6	5	12,8%	11,1%
2	JF Instruktur	15	14	31,9%	31,1%
3	JFU	11	10	23,4%	22,2%
4	JF	6	7	12,8%	15,6%
	Jumlah B				
	Jumlah Total	47	45	100%	100%

**Prasarana dan Sarana Dinperinaker Kota Pekalongan
Tahun Desember 2024**

NO	SARPRAS	JUMLAH	SATUAN
1	PC Unit Komputer	90	Unit
2	Printer	65	Unit
3	Scanner	5	Unit
4	Notebook / Laptop	45	Unit
5	LCD Proyektor	16	Unit
6	Mesin Ketik	7	Unit
7	AC Unit	49	Unit
8	AC Split	42	Unit
9	Televisi	28	Unit
10	Telepon	1	Unit
11	Sound System	6	Unit
12	Filling Cabinet	27	Unit
13	Lemari Besi	16	Unit
14	Lemari Kayu	33	Unit
15	LAN	-	Jaringan
16	Kendaraan Roda 4	7	Unit



**DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
KOTA PEKALONGAN**

NO	SARPRAS	JUMLAH	SATUAN
17	Kendaraan Roda 3	2	Unit
18	Kendaraan Roda 2	31	Unit
19	Kursi Rapat	39	Unit
20	Kursi Putar	54	Unit
21	Kursi Tangan	245	Unit
22	Meja Panjang	10	Unit
23	Meja Biro	2	Unit
24	Meja Rapat	17	Unit
25	Meja Tulis	27	Unit

1.4. ISU STRATEGIS

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Pekalongan (Dinperinaker) adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa depan. Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Isu strategis diperoleh dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan tantangan pada lima tahun mendatang. Berdasarkan identifikasi permasalahan serta memperhatikan analisis terkait dengan tantangan dan peluang, faktor pendorong dan penghambat, serta hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan Kota Pekalongan jangka menengah, maka dapat ditetapkan isu strategis Dinperinaker Kota Pekalongan yaitu :

1. Masih kurangnya kualitas dan kompetensi calon tenaga kerja.
2. Kebijakan dan program yang pro job disertai dengan penyiapan calon tenaga kerja oleh Lembaga Pendidikan dan Pelatihan yang siap memasuki pasar kerja.
3. Peningkatan jumlah wirausaha baru.
4. Klasifikasi industri kecil menjadi industri menengah/ besar.
5. Perkembangan industri kecil menjadi menengah atau besar cenderung turun.



**DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
KOTA PEKALONGAN**

6. Masih terbatasnya kemampuan pemanfaatan teknologi dalam pengembangan produk untuk meningkatkan daya saing;
7. Masih rendahnya kemampuan kreativitas dan inovasi dalam mengembangkan produk;
8. Masih tingginya tingkat pengangguran;
9. Masih rendahnya ketrampilan pencari kerja/tenaga kerja;
10. Masih rendahnya tingkat kesejahteraan tenaga kerja;
11. Masih banyaknya pencari kerja yang terdaftar yang belum ditempatkan;
12. Belum sebandingnya jumlah kesempatan kerja dengan pencari kerja;
13. Masih banyaknya kasus yang perlu diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB);



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

2.1 RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021 – 2026

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Penyusunan LKjIP Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2024 ini, mengacu pada Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekalongan Tahun 2021–2026 dan dokumen Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Pekalongan Tahun 2021-2026.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 merupakan Dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun (perencanaan jangka menengah) yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan. RPJMD secara sistematis mengedepankan isu-isu strategis, yang diterjemahkan kedalam bentuk strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan. Perubahan atas RPJMD bertujuan untuk menyesuaikan dengan perkembangan isu strategis dan sebagai tindak lanjut atas evaluasi kegiatan serta kebijakan yang dijalankan.



**DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
KOTA PEKALONGAN**

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategik. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintahan dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Program Perangkat Daerah merupakan program-program pada RPJMD Kota Pekalongan tahun 2021-2026 yang sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Kegiatan dan sub kegiatan merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengeralahan sumber daya, baik berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan, teknologi, dan anggaran sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Kegiatan dan sub kegiatan yang dipilih untuk setiap program diupayakan dapat menunjukkan akuntabilitas karena merupakan turunan/deployment/cascading dari program serta tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Pekalongan.

Tabel 2.1. Matriks Perencanaan Kinerja pada
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2024

Visi-Misi-Tujuan-Sasaran-Program Kegiatan	Indikator	Target 2024
VISI : Mewujudkan Kota Pekalongan yang Lebih Sejahtera, Mandiri dan Religius		
Misi ke 2 : Mewujudkan sumber daya manusia yang religius, kompeten dan produktif guna menjawab tantangan era perubahan.		



**DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
KOTA PEKALONGAN**

Visi-Misi-Tujuan-Sasaran-Program Kegiatan	Indikator	Target 2024
Tujuan Kota : Meningkatkan kualitas SDM yang religius, kompeten dan produktif.	Tingkat Pengangguran Terbuka	6,31%
Sasaran Kota : Meningkatnya SDM yang kompeten dan produktif.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	70,81%
Tujuan Dinperinaker : Meningkatkan SDM yang kompeten dan produktif.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	74,22%
Sasaran Dinperinaker : Meningkatnya jumlah Tenaga Kerja Siap Pakai yang ditempatkan	Persentase tenaga siap pakai yang ditempatkan	52,29%
Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	1,10%
Kegiatan : Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase Pelaksanaan Pelatihan Kejuruan	100%
Kegiatan : Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Persentase kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	80%
Kegiatan : Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Jumlah kegiatan Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	6 tenant
Kegiatan : Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah	40%
Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga kerja yg ditempatkan (dalam & luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kab/ kota	25,93%
Kegiatan : Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/ Kota yg dilaksanakan	11,86%
Kegiatan : Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah laporan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja yang disusun	12 buku
Kegiatan : Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	persentase CPMI yang terlayani secara legal	44%
Program Hubungan Industrial	Persentaseperusahaan yg mene-rapkan tata kelola kerja yg layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	50%



**DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
KOTA PEKALONGAN**

Visi-Misi-Tujuan-Sasaran-Program Kegiatan	Indikator	Target 2024
Kegiatan : Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan	40,17%
Kegiatan : Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan	72,45%
Misi ke 5 : Membangun ekonomi kreatif berbasis potensi lokal		
Tujuan Kota : Menumbuhkan tingkat perekonomian masyarakat	PDRB Perkapita	37,16 - 37,82 Rp. Juta/jiwa/ tahun
Sasaran Kota : Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	Pertumbuhan ekonomi	2,53 - 3,32 %
Tujuan Dinperinaker : Meningkatkan kontribusi perindustrian terhadap pertumbuhan sektor industri pengolahan	Pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan	3,32%
Sasaran Dinperinaker : Meningkatnya Pertumbuhan Industri	Pertumbuhan Industri	2,30%
Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP.	75.34%
Kegiatan : Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota	Persentase kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana	3,5%
Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/ Kota	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) kecil dan Industri Menengah yg dikeluarkan oleh instansi terkait	25%
Kegiatan : Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan	Persentase pelaksanaan kegiatan rekomendasi	28%



**DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
KOTA PEKALONGAN**

Visi-Misi-Tujuan-Sasaran-Program Kegiatan	Indikator	Target 2024
Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Penerbitan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kab/Kota	
Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini (IKK Outcome)	100%
Kegiatan : Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk Infor-masi Industri untuk IUI,IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dilaksanakan	30%
Misi ke 7 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien berdasarkan prinsip-prinsip good governance dan clean governmen		
Tujuan Kota : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efesien	Indeks Reformasi Birokrasi	73,69 indeks
Sasaran Kota : Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan	Nilai SAKIP Kota	75,07 skor
Tujuan Dinperinaker : Meningkatkan Kualitas Layanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	80,47%
Sasaran Dinperinaker : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	75%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100%
Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%
Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100%
	Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%



**DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
KOTA PEKALONGAN**

Visi-Misi-Tujuan-Sasaran-Program Kegiatan	Indikator	Target 2024
Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%
Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100%
Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%
	Persentase pengadaan/ pemeliharaan barang milik daerah	100%
Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%

2.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021-2026

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (core business) yang diemban. IKU dipilih dari serangkaian indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik. IKU perlu ditetapkan oleh pimpinan Pemerintah Daerah sebagai dasar penilaian untuk setiap tingkatan organisasi dan memberikan informasi mengenai sejauh mana keberhasilan organisasi dalam mencapai target kinerja. Indikator Kinerja Utama yang baik menggambarkan dengan jelas dan terukur hasil kinerja yang diharapkan. Indikator Kinerja Utama yang menjadi tanggung jawab utama Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Pekalongan disajikan pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2.

Target Sasaran Kinerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2021-2026

No.	Sasaran Strategis	IKU	Satuan	Formulasi	Sumber Data
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	indeks	Nilai SAKIP Tahun N	Inspektorat
2	Meningkatnya Jumlah Tenaga Kerja Siap Pakai yang ditempatkan	Persentase tenaga siap pakai yang ditempatkan	persen	Tenaga Kerja Hasil Pelatihan Tahun N-1 yang Bekerja pada Tahun N / Peserta	Dinperinaker



**DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
KOTA PEKALONGAN**

No.	Sasaran Strategis	IKU	Satuan	Formulasi	Sumber Data
				Pelatihan pada Tahun N-1 * 100%	
3	Meningkatnya Pertumbuhan Industri di Kota Pekalongan	Pertumbuhan Industri	persen	Pertumbuhan pdrb sektor industri pengolahan tahun n	BPS

Target yang ditetapkan untuk Indikator Kinerja Utama Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Pekalongan sebagaimana telah dicantumkan dalam perencanaan strategis dan disajikan pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3.
Target Sasaran Kinerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Tahun 2021-2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	indeks	70	71,50	73	75	75,25	75,50
2	Meningkatnya Jumlah Tenaga Kerja Siap Pakai yang ditempatkan	Persentase tenaga siap pakai yang ditempatkan	persen	52,17	52,22	52,26	52,29	52,33	52,36
3	Meningkatnya Pertumbuhan Industri di Kota Pekalongan	Pertumbuhan Industri	persen	-0,255	0,099	0,085	2,30	2,30	2,30

2.3 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.



**DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
KOTA PEKALONGAN**

Dokumen Perjanjian Kinerja memuat informasi tentang sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, Indikator Kinerja Sasaran, dan Rencana Capaiannya. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Penetapan Indikator Kinerja Kegiatan harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang ada di organisasi.

Tabel 2.3. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

No	Sasaran Strategis	Indikator	2024		Keterangan
			Satuan	Target	
TUJUAN DINPERINAKER					
1	Meningkatkan Kualitas Layanan Publik	Indeks kepuasan masyarakat	Indeks	87,52	Formulasi : IKM tahun N Tipe capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber data : Bag. Organisasi
2	Meningkatkan SDM yang Kompeten dan Produktif	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	persen	70,81	Formulasi : Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Tipe capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber data : BPS
3	Meningkatkan kontribusi perindustrian terhadap pertumbuhan sektor industri pengolahan	Pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan	persen	3,32	Formulasi : (Nilai PDRB sektor industri pengolahan tahun N dikurangi Nilai PDRB sektor industri pengolahan tahun N-1) dibagi Nilai PDRB sektor industri pengolahan tahun N-1 dikali 100 Tipe capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber data : BPS
SASARAN DINPERINAKER					
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	indeks	75	Formulasi : Nilai SAKIP tahun N Tipe capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik



**DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
KOTA PEKALONGAN**

No	Sasaran Strategis	Indikator	2024		Keterangan
			Satuan	Target	
					Sumber data : Inspektorat
2	Meningkatnya Jumlah Tenaga Kerja Siap Pakai yang ditempatkan	Persentase tenaga siap pakai yang ditempatkan	persen	52,29	Formulasi : Tenaga Kerja Hasil Pelatihan Tahun N-1 yang Bekerja pada Tahun N / Peserta Pelatihan pada Tahun N-1 * 100% Tipe capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber data : Dinperinaker
3	Meningkatnya Pertumbuhan Industri di Kota Pekalongan	Pertumbuhan Industri	persen	2,30	Formulasi : Pertumbuhan Industri tahun N Tipe capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber data : Dinperinaker

Program		Anggaran	Keterangan
Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp.	3.724.570.000	APBD
Program Penempatan Tenaga Kerja	Rp.	609.293.000	APBD
Program Hubungan Industrial	Rp.	531.202.000	APBD
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	7.476.890.000	APBD
Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Rp.	338.389.000	APBD
Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Rp.	10.221.000	APBD
Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Rp.	94.380.000	APBD



**BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah.

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Pekalongan selaku pengembal amanah masyarakat Kota Pekalongan melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Pekalongan yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan kinerja tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah ini didasarkan pada Penetapan Kinerja dan Indikator Kinerja Utama Renstra Tahun 2021 – 2026.

3.1 PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk :

- **Pembuatan Kebijakan dan Pengawasannya**
Meningkatkan perumusan kebijakan dengan menyediakan dasar-dasar yang memadai bagi para pengambil keputusan untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan mengenai kebutuhan, kinerja pelayanan, dan membuat keputusan realokasi sumber daya jika diperlukan.
- **Arahan Operasional**
Memberikan cara yang lebih sistematis untuk mendeteksi kekuatan/



DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KOTA PEKALONGAN

kelemahan operasional untuk melakukan analisa program yang berkelanjutan.

➤ **Akuntabilitas**

Membantu untuk memperoleh kepercayaan masyarakat dengan memperlihatkan hasil yang baik dari pendapatan yang diterima.

➤ **Perencanaan**

Memfasilitasi perencanaan strategis dan operasional dengan cara menyediakan informasi yang dibutuhkan dalam menetapkan tujuan dan sasaran serta merencanakan program-program untuk pencapaian tujuan dan sasaran tersebut.

➤ **Pengelolaan**

Memberikan dasar bagi identifikasi awal dari adanya penurunan efisiensi operasional dan cara untuk memperlihatkan seberapa efisien sumber daya digunakan dalam penyediaan pelayanan dan pencapaian tujuan.

➤ **Penganggaran**

Memperbaiki proses anggaran dengan sebisa mungkin membuat keputusan yang objektif mengenai alokasi dan redistribusi sumber daya, pengurangan biaya, dan menginvestasikan kelebihan/surplus dana.

➤ **Penyediaan pelayanan kepada pihak luar**

Membantu terciptanya iklim yang kompetitif dalam penyediaan pelayanan oleh pihak luar dengan cara memberikan data biaya dan kinerja yang didokumentasikan dengan baik serta memonitor kinerja pihak kontraktor berkaitan dengan kualitas pelayanan.

➤ **Pengawasan Kerja**

Berguna dalam mencapai kinerja pegawai yang lebih baik dengan memberikan dasar yang obyektif bagi penetapan target kinerja dan memberikan masukan dan insentif.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014



DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KOTA PEKALONGAN

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Kerangka Pengukuran kinerja di Pemerintah Kota Pekalongan dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 dan Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut :

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja Utama} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja Utama} = \frac{\text{Target}}{\text{Realisasi}} \times 100\%$$

3. Rumus Efisiensi

Rumus efisiensi penggunaan sumber daya sebagai berikut :

$$\text{Efisiensi} = \left(\frac{\text{capaian kinerja}}{\text{capaian anggaran}} \right) - 1 \times 100$$

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran sesuai Permendagri No. 54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu :



**DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
KOTA PEKALONGAN**

Tabel 3.1 Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal	Predikat / Kategori
90.1 s.d. lebih	Sangat Tinggi / Sangat Berhasil
75.1 s.d. 90	Tinggi / Berhasil
65.1 s.d. 75	Sedang / Cukup Berhasil
50.1 s.d. 65	Rendah / Tidak Berhasil
0 s.d. 50	Sangat Rendah / Sangat Tidak Berhasil

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisa untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja. Untuk capaian masing-masing indikator kinerja sasaran disimpulkan berdasarkan "Metode Rata-rata Data Kelompok".

Penyimpulan capaian sasaran ditetapkan Nilai Mean setiap kategori sebagai berikut :

Sangat Berhasil	:	95
Berhasil	:	82.5
Cukup Berhasil	:	70
Tidak Berhasil	:	57.5
Sangat Tidak Berhasil	:	25

Penyimpulan pada tingkat sasaran dilakukan dengan mengalikan jumlah indikator untuk setiap kategori (sangat berhasil, berhasil, cukup berhasil, tidak berhasil, dan sangat tidak berhasil) yang ada di setiap kelompok sasaran dengan rumus penghitungan sebagai berikut :

$$\text{Capaian Kinerja Sasaran} = \frac{\text{jumlah indikator untuk setiap kategori} \times \text{nilai mean}}{\text{jumlah indikator kinerja sasaran}}$$

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TUJUAN

Adapun untuk penilaian capaian kinerja tujuan untuk setiap indikator tujuan ditetapkan rumus penghitungan dan skala ordinal sesuai Permendagri No. 54 tahun 2010 sebagaimana penghitungan indikator kinerja utama tersebut di atas.



**DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
KOTA PEKALONGAN**

3.2 EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

3.2.1 Capaian Indikator Kinerja Utama

Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Pekalongan Tahun 2024 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.2 Pengukuran Kinerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Pekalongan Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	Indeks	75,00	75,45	100,6	Sangat Berhasil
2	Meningkatnya Jumlah Tenaga Kerja Siap Pakai yang ditempatkan	Persentase tenaga siap pakai yang ditempatkan	persen	52,29	56,82	108,66	Sangat Berhasil
3	Meningkatnya Pertumbuhan industri	Pertumbuhan Industri.	persen	0,085	n/a	n/a	Belum Tersedia

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tabel di atas dapat diketahui :

- 1) Target dengan capaian realisasi tepat dan di atas 100% sebanyak 2 target;
- 2) Target dengan realisasi di bawah 100% sebanyak 0 target;
- 3) Target yang tidak dapat diperoleh hasil pengukurannya sebanyak 1 target.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian kinerja sebesar 104,63% dengan kategori **“Sangat Tinggi / Sangat Berhasil”**

Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Capaian Kinerja				Ket
				2021	2022	2023	2024	
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	Indeks	72,37	73,40	74,70	75,45	▲
2	Meningkatnya Jumlah Tenaga Kerja Siap Pakai yang ditempatkan	Persentase tenaga siap pakai yang ditempatkan	persen	68	61,50	49,26	56,82	▲
3	Meningkatnya Pertumbuhan industri	Pertumbuhan Industri.	persen	17,32	5,48	n/a	n/a	●

Keterangan :

- ▲ = Naik
● = Tetap
▼ = Turun



**DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
KOTA PEKALONGAN**

Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja sampai dengan Tahun 2024 dengan target akhir Renstra 2026

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi s/d 2024	Target Akhir Renstra 2026	Capaian (%)	Kategori
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	Indeks	75,45	75,50	99,93	Sangat Berhasil
2	Meningkatnya Jumlah Tenaga Kerja Siap Pakai yang ditempatkan	Persentase tenaga siap pakai yang ditempatkan	persen	56,82	52,36	108,52	Sangat Berhasil
3	Meningkatnya Pertumbuhan industri	Pertumbuhan Industri.	persen	n/a	2,30	n/a	Belum Tersedia

3.2.2. Capaian Kinerja Tujuan

Adapun simpulan untuk kategori capaian indikator kinerja tujuan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.5 Realisasi Capaian Kinerja Tujuan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Pekalongan Tahun 2024

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
1	Meningkatkan Kualitas Layanan Publik	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	indeks	87,52	90,52	103,43	Sangat Berhasil
2	Meningkatkan SDM yang Kompeten dan Produktif	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	persen	70,81	76,06	107,41	Sangat Berhasil
3	Meningkatkan Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan	Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan	persen	3,32	n/a	n/a	Belum Tersedia data

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tabel di atas dapat diketahui :

- 1) Target dengan capaian realisasi tepat dan di atas 100% sebanyak 2 target;
- 2) Target dengan realisasi di bawah 100% sebanyak 0 target;
- 3) Target yang tidak dapat diperoleh hasil pengukurannya sebanyak 1 target.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian kinerja sebesar 105,42% dengan kategori **“Sangat Tinggi / Sangat Berhasil”**



**DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
KOTA PEKALONGAN**

3.2.3. Analisis Capaian Kinerja

SASARAN 1 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Capaian indikator kinerja sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

Tabel 3.8 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 1

No	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Satuan	Capaian Tahun 2022	Capaian Tahun 2023	Tahun 2024			Target Akhir Renstra 2026
						Target	Realisasi	% Capaian	
1	Nilai SAKIP OPD	70,00	indeks	73,40	74,70	75,00	75,45	100,6	75,50

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), telah dilakukan evaluasi atas akuntabilitas kinerja Internal Perangkat Daerah Tahun 2024. Hasil evaluasi AKIP Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Pekalongan memperoleh nilai 75,45 atau dengan katagori BB predikat “Sangat Baik”. Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Pekalongan sudah menunjukkan hasil yang sangat baik.

Berikut data rincian hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 3.40 Rincian Hasil Evaluasi AKIP Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Pekalongan Tahun 2024

No	Daerah	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30	22,20
2	Pengukuran Kinerja	30	22,20
3	Pelaporan Kinerja	15	12,30
4	Evaluasi Akuntabilitas	25	18,75
Nilai Hasil Evaluasi		100	75,45
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB “Sangat Baik”	



**DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
KOTA PEKALONGAN**

Tabel 3.17. Perbandingan Nilai Evaluasi AKIP dengan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2024

No	Nama Perangkat Daerah	Nilai AKIP Tahun 2024	Predikat
1	AKIP PROVINSI JAWA TENGAH	82,63	A
2	AKIP KOTA PEKALONGAN	73,02	BB
3	BAPPEDA	88,50	A
4	DINKOMINFO	83,40	A
5	DLH	85,45	A
6	DINDAGKOP-UMKM	85,75	A
7	INSPEKTORAT DAERAH	84,60	A
8	DPU-PR	81,25	A
9	BPKAD	84,50	A
10	DPMPPA	82,75	A
11	DKP	83,25	A
12	BKPSDM	83,20	A
13	DISDUKCAPIL	82,90	A
14	DINKES	83,20	A
15	SETDA	81,50	A
16	DINDIK	78,45	BB
17	DINPARBUDPORA	77,55	BB
18	DPMPTSP	77,90	BB
19	DINAS PERHUBUNGAN	77,15	BB
20	DINPERPA	76,10	BB
21	KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN	77,00	BB
22	DINARPUS	75,45	BB
23	KECAMATAN PEKALONGAN BARAT	76,15	BB
24	KECAMATAN PEKALONGAN UTARA	76,10	BB
25	KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR	76,25	BB
26	BPBD	75,45	BB
27	DINPERINAKER	75,45	BB
28	DINSOS P2KB	75,90	BB
29	DINPERKIM	74,75	BB
30	SATPOL P3KP	74,25	BB
31	SEKRETARIAT DPRD	75,15	BB
32	KESBANGPOL	73,45	BB

Faktor pendukung keberhasilan capaian kinerja sebagai berikut :

- a. Adanya komitmen yang kuat dari Pimpinan terkait kebijakan SAKIP;
- b. Adanya koordinasi dan komunikasi yang baik antar stakeholder di bidang perencanaan, penganggaran, pelaporan dan evaluasi;
- c. Adanya dukungan yang kuat dari personil yang membidangi perencanaan dan evaluasi pada Perangkat Daerah.

Berikut adalah program dan kegiatan serta anggaran yang digunakan guna mendukung indikator kinerja :



**DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
KOTA PEKALONGAN**

PROGRAM	KEGIATAN	PAGU PENETAPAN (Rp.)	PAGU PERUBAHAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/K OTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17,148,000	17,148,000	17,147,800
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6,699,778,000	6,217,341,000	5,443,846,471
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5.000.000	5.000.000	5.000.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	259,873,000	313,873,000	294,611,360
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	0	0
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	611,088,000	625,228,000	620,008,629
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	298,300,000	298,300,000	295,546,474
Total		7,891,187,000	7,476,890,000	6.676.160.734

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase realisasi penggunaan anggaran adalah sebesar pagu sebesar 89,29%. Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja indikator kinerja sasaran sebesar 100,6%, maka dapat dikatakan terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 12,67%.

Pencapaian indikator sasaran ini didukung melalui 1 (satu) program sebagai berikut:

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota. Target untuk indikator ini adalah 100% dan realisasi 100,01% sehingga capaiannya 100,01%. Indikator program ini dapat terealisasi karena adanya komitmen dari Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Pekalongan dalam meningkatkan pelayanan perencanaan dan penganggaran, administrasi keuangan, administrasi umum, administrasi kepegawaian, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah melalui proses digital yang mudah, efektif dan efisien. Program ini diwujudkan dalam pelaksanaan 7 (tujuh) kegiatan sebagai berikut :
 - a) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Kegiatan ini diukur dengan indikator Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah dengan target 100% realisasi 100% sehingga capaiannya 100%. Indikator ini tercapai karena didukung oleh 3 (Tiga) Sub Kegiatan yaitu :



**DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
KOTA PEKALONGAN**

- i. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
- ii. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
- iii. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
- b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, kegiatan ini diukur dengan indikator Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah dengan target 100% realisasi 100% sehingga capaiannya 100%. Indikator ini tercapai karena didukung oleh 3 (Tiga) Sub Kegiatan yaitu :
 - i. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - ii. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD;
 - iii. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.
- c) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, kegiatan ini diukur dengan indikator Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah dengan target 100% realisasi 100% sehingga capaiannya 100%. Indikator ini tercapai karena didukung oleh 1 (satu) Sub Kegiatan yaitu :
 - i. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya.
- d) Administrasi Umum Perangkat Daerah, kegiatan ini diukur dengan indikator Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah dengan target 100% realisasi 97,74% sehingga capaiannya 97,74%. Indikator ini tercapai karena didukung oleh 7 (tujuh) Sub Kegiatan yaitu :
 - i. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - ii. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - iii. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
 - iv. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - v. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - vi. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
 - vii. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- e) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, kegiatan ini diukur dengan indikator Persentase ketercapaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan target 100% realisasi 100% sehingga capaiannya 100%. Indikator ini tercapai karena didukung oleh 3 (tiga) Sub Kegiatan yaitu :
 - i. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - ii. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;



**DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
KOTA PEKALONGAN**

iii. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

f) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, kegiatan ini diukur dengan indikator Persentase ketercapaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan target 100% realisasi 118,76% sehingga capaiannya 118,76%. Indikator ini tercapai karena didukung oleh 3 (tiga) Sub Kegiatan yaitu :

- i. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
- ii. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
- iii. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

SASARAN 2 : Meningkatnya Jumlah Tenaga Kerja Siap Pakai yang ditempatkan

Capaian indikator kinerja sasaran Meningkatnya Jumlah Tenaga Kerja Siap Pakai yang ditempatkan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.8 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 2

No	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Satuan	Capaian Tahun 2022	Capaian Tahun 2023	Tahun 2024			Target Akhir Renstra 2026
						Target	Realisasi	% Capaian	
1	Persentase tenaga siap pakai yang ditempatkan	68,00	persen	61,50	49,26	52,29	56,82	108,66	52,36

Indikator Persentase tenaga siap pakai yang ditempatkan merupakan indikator kinerja mandiri Kota Pekalongan sehingga tidak dapat dibandingkan dengan Standar Nasional maupun Provinsi.

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja sasaran 2 dengan indikator kinerja “Persentase tenaga siap pakai yang ditempatkan” dengan target sebesar 52,29% dan terealisasi sebesar 56,82% atau dengan capaian sebesar 108,66%, atau dengan katagori “Sangat Baik”. Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan untuk urusan ketenagakerjaan yang berorientasi pada hasil di Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Pekalongan sudah menunjukkan hasil yang sangat baik.



**DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
KOTA PEKALONGAN**

Faktor pendukung keberhasilan capaian kinerja sebagai berikut :

1. Adanya kerjasama dan koordinasi yang baik antar OPD terkait, stakeholder dan masyarakat sebagai penerima manfaat;
2. Koordinasi dan kerjasama yang baik antar bidang/UPTD BLK / LPKS/ Instansi/ Lembaga lainnya dalam pelaksanaan kegiatan;
3. Kerjasama yang baik antar tim dan staf terkait dalam pelaksanaan kegiatan;
4. Meningkatnya partisipasi perusahaan dalam mengikuti kegiatan;
5. Adanya Kerjasama yang baik dari Manajemen / HRD Perusahaan;
6. Sarana dan prasarana yang mendukung dalam pelaksanaan kegiatan;
7. Anggaran/ dana yang memadai sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan baik dan lancar.

Berikut adalah program dan kegiatan serta anggaran yang digunakan guna mendukung indikator kinerja :

PROGRAM	KEGIATAN	PAGU PENETAPAN (Rp.)	PAGU PERUBAHAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)
URUSAN KETENAGAKERJAAN				
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi.	3,315,449,000	3,551,399,000	3.263.885.728
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta.	67,214,000	67,214,000	61.865.000
	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil.	79,126,000	79,126,000	77.412.704
	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.	45,301,000	26,831,000	25.472.500
TENAGA PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA KERJA	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota.	425,947,000	364.033.000	277.190.900
	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja.	265,740,000	238,020,000	219.555.363
	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota.	104,110,000	57,240,000	48.062.800
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.	328,864,000	414.057.000	399.854.000
	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota.	121,505,000	117,145,000	116.721.500
Total		4,753,256,000	4,775,065,000	4.490.020.495



**DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
KOTA PEKALONGAN**

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pagu sebesar Rp. 4,775,065,000,- dengan realisasi sebesar Rp. 4.490.020.495,- atau persentase realisasi penggunaan anggaran adalah sebesar 94,03%.

Pencapaian indikator sasaran ini didukung melalui 3 (tiga) program sebagai berikut:

1) Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja. Target untuk indikator ini adalah 1,10% dan realisasi 1,41% sehingga capaiannya 128,42%. Indikator program ini dapat terealisasi karena adanya komitmen dari Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Pekalongan dalam meningkatkan pelayanan dalam bidang ketenagakerjaan seperti diantaranya pelatihan, pemagangan dan pembinaan bagi para calon pencari kerja melalui proses digital yang mudah, efektif dan efisien. Program ini diwujudkan dalam pelaksanaan 4 (empat) kegiatan sebagai berikut :

a. Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi.

Kegiatan ini diukur dengan indikator Persentase Pelaksanaan Pelatihan Kejuruan dengan target 100% realisasi 100% sehingga capaiannya 100%.

Indikator ini tercapai karena didukung oleh 3 (Tiga) Sub Kegiatan yaitu :

- i. Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi;
- ii. Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja;
- iii. Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota.

b. Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta.

Kegiatan ini diukur dengan indikator Persentase kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta dengan target 80% realisasi 90,91% sehingga capaiannya 113,64%. Indikator ini tercapai karena didukung oleh 1 (satu) Sub Kegiatan yaitu :

- i. Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta.

c. Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil.

Kegiatan ini diukur dengan indikator Jumlah kegiatan Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil dilaksanakan dengan target 6 tenant realisasi 6 tenant sehingga capaiannya 100%. Indikator ini tercapai karena didukung oleh 1 (satu) Sub Kegiatan yaitu :

- i. Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil.



**DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
KOTA PEKALONGAN**

d. Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

Kegiatan ini diukur dengan indikator Persentase kegiatan Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan target 40% realisasi 56,82% sehingga capaiannya 142,05%. Indikator ini tercapai karena didukung oleh 1 (satu) Sub Kegiatan yaitu :

i. Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja.

- 2) Program Penempatan Tenaga Kerja, target untuk indikator ini adalah 25,93% dan realisasi 33,81% sehingga capaiannya 130,39%. Indikator program ini dapat terealisasi karena adanya komitmen dari Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Pekalongan dalam meningkatkan pelayanan dalam bidang ketenagakerjaan seperti diantaranya penempatan, penyuluhan dan informasi bagi para calon pencari kerja baik melalui konsultasi verbal maupun proses digital yang mudah, efektif dan efisien. Program ini diwujudkan dalam pelaksanaan 3 (tiga) kegiatan sebagai berikut:

a. Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota.

Kegiatan ini diukur dengan indikator Persentase kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan dengan target 11,86% realisasi 68,09% sehingga capaiannya 574,08%. Indikator ini tercapai karena didukung oleh 4 (empat) Sub Kegiatan yaitu :

- i. Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja;
- ii. Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja;
- iii. Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan;
- iv. Perluasan Kesempatan Kerja.

a. Pengelolaan Informasi Pasar Kerja.

Kegiatan ini diukur dengan indikator Jumlah laporan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja yang disusun dengan target 12 buku realisasi 12 buku sehingga capaiannya 100%. Indikator ini tercapai karena didukung oleh 3 (tiga) Sub Kegiatan yaitu :

- i. Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online;
- ii. Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online;
- iii. Job Fair/Bursa Kerja.

- b. Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota.
- Kegiatan ini diukur dengan indikator persentase CPMI yang terlayani secara legal dengan target 44% realisasi 59,21% sehingga capaiannya



**DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
KOTA PEKALONGAN**

134,57%. Indikator ini tercapai karena didukung oleh 2 (dua) Sub Kegiatan yaitu :

- i. Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI);
- ii. Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran.

3) Program Hubungan Industrial, target untuk indikator ini adalah 50,00% dan realisasi 50,93% sehingga capaiannya 101,86%. Indikator program ini dapat terealisasi karena adanya komitmen dari Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Pekalongan dalam meningkatkan pelayanan dalam bidang ketenagakerjaan dalam hal pencegahan dan penyelesaian perselisihan sekaligus sebagai mediator bagi pekerja/buruh dan pengusaha baik melalui komunikasi verbal maupun proses digital yang mudah, efektif dan efisien. Program ini diwujudkan dalam pelaksanaan 2 (dua) kegiatan sebagai berikut:

- a. Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.

Kegiatan ini diukur dengan indikator Persentase kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan target 40,17% realisasi 64,52% sehingga capaiannya 160,63%. Indikator ini tercapai karena didukung oleh 3 (tiga) Sub Kegiatan yaitu :

- i. Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan;
- ii. Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan;
- iii. Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan.

- b. Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota.

Kegiatan ini diukur dengan indikator Persentase kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan target 72,45% realisasi 100,71% sehingga capaiannya 139%. Indikator ini tercapai karena didukung oleh 5 (lima) Sub Kegiatan yaitu :

- i. Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan



**DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
KOTA PEKALONGAN**

- Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota;
- ii. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota;
- iii. Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi;
- iv. Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota;
- v. Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja.

SASARAN 3 : Meningkatnya Pertumbuhan industri

Capaian indikator kinerja sasaran Meningkatnya Pertumbuhan industri adalah sebagai berikut :

Tabel 3.8 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 3

No	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Satuan	Capaian Tahun 2022	Capaian Tahun 2023	Tahun 2024			Target Akhir Renstra 2026
						Target	Realisasi	% Capaian	
1	Pertumbuhan Industri.	n/a	persen	n/a	n/a	2,30	n/a	n/a	2,30

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja sasaran 3 dengan indikator kinerja “Pertumbuhan Industri” dengan target sebesar 2,30% dan belum terealisasi. Hal tersebut belum dapat diketahui karena data belum dirilis oleh BPS.

Untuk data “**Pertumbuhan Industri**” pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

No .	Daerah	Tahun		
		2021	2022	2023
1.	Nasional	3,39	4,89	4,64
2.	Jawa Tengah	2,34	3,88	4,31
3.	Kota Pekalongan	n/a	n/a	n/a
4.	Kabupaten Batang	n/a	n/a	n/a
5.	Kabupaten Pekalongan	n/a	n/a	n/a
6.	Kabupaten Pemalang	n/a	n/a	n/a

Sumber data : Badan Pusat Statistik Nasional dan Jawa Tengah, 2025



**DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
KOTA PEKALONGAN**

Faktor pendukung keberhasilan capaian kinerja sebagai berikut :

1. Data IKM sudah tersedia dengan baik, dalam mendukung peningkatan kompetensi IKM.
2. Kerjasama dengan para Stakeholder dan Lembaga Masyarakat sudah terjalin dengan baik.
3. Adanya dukungan sarpras dan penunjang lainnya dalam pelaksanaan kegiatan.

Faktor penghambat ketercapaian kinerja sebagai berikut :

1. Terkait data SIINAS, masih banyak IKM yang belum mendaftarkan perusahaan ke sisitem SIINAS, sehingga belum diketahui secara pasti data dari masing-masing IKM.
2. Terkait limbah masih ada IKM yang belum mengindahkan aturan terkait pengolahan limbah.
3. Jumlah IKM yang terdaftar di OSS lebih banyak sehingga volume pengawasannya belum bisa optimal karena terbatasnya SDM dan anggaran.

Upaya perbaikan guna ketercapaian kinerja sebagai berikut :

1. Mengadakan Sosialisasi SIINAS baik untuk industri kecil maupun perusahaan.
2. Mengadakan kerjasama dengan Perguruan Tinggi dan Balai Besar Batik untuk mengadakan Sosialisasi Pelatihan Produksi Bersih terkait pengurangan limbah dan meningkatkan kesadaran masyarakat.
3. Memprioritaskan kegiatan pengawasan untuk industri dengan resiko menengah tinggi.

Berikut adalah program dan kegiatan serta anggaran yang digunakan guna mendukung indikator kinerja :

PROGRAM	KEGIATAN	PAGU PENETAPAN (Rp.)	PAGU PERUBAHAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)
URUSAN PERINDUSTRIAN				
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	359,669,000	338,389,000	325.174.514
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI) Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kab/Kota	10,221,000	10,221,000	10,221,000



**DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
KOTA PEKALONGAN**

PROGRAM	KEGIATAN	PAGU PENETAPAN (Rp.)	PAGU PERUBAHAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	94,380,000	94,380,000	78.998.000
Total		464.270.000	442.990.000	414.393.514

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pagu sebesar Rp. 442.990.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 414.393.514,- atau persentase realisasi penggunaan anggaran adalah sebesar 93,54%.

Pencapaian indikator sasaran ini didukung melalui 3 (tiga) program sebagai berikut:

- 1) Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri. Target untuk indikator ini adalah 75,34% dan realisasi 82,71% sehingga capaiannya 109,78%. Indikator program ini dapat terealisasi karena adanya komitmen dari Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Pekalongan dalam meningkatkan pelayanan dalam bidang perindustrian seperti diantaranya pembinaan, penyuluhan, pelatihan dan monitoring secara berkala kepada para IKM di wilayah Kota Pekalongan baik melalui komunikasi verbal maupun proses digital yang mudah, efektif dan efisien. Program ini diwujudkan dalam pelaksanaan 1 (satu) kegiatan sebagai berikut :

- a. Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota.

Kegiatan ini diukur dengan indikator Persentase kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan target 3,50% realisasi 44,44% sehingga capaiannya 1.269,84%.

Indikator ini tercapai karena didukung oleh 5 (lima) Sub Kegiatan yaitu :

- i. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri;
- ii. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri;
- iii. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri;
- iv. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat;



**DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
KOTA PEKALONGAN**

v. Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri.

2) Program Pengendalian Izin Usaha Industri

Target untuk indikator ini adalah 25% dan realisasi 19,65% sehingga capaiannya 78,60%. Indikator program ini dapat terealisasi walaupun belum memenuhi target karena adanya komitmen dari Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Pekalongan dalam meningkatkan pelayanan dalam bidang perindustrian seperti diantaranya pelayanan konsultasi yang berkaitan dengan pengajuan ijin Halal, Merk dan lain-lain baik melalui komunikasi verbal maupun proses digital yang mudah, efektif dan efisien. Program ini diwujudkan dalam pelaksanaan 1 (satu) kegiatan sebagai berikut :

- a. Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota.

Kegiatan ini diukur dengan indikator Persentase pelaksanaan kegiatan rekomendasi Penerbitan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kab/Kota dengan target 28% realisasi 73,33% sehingga capaiannya 261,90%. Indikator ini tercapai karena didukung oleh 1 (satu) Sub Kegiatan yaitu :

- i. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota.

3) Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

Target untuk indikator ini adalah 100% dan realisasi 95% sehingga capaiannya 95%. Indikator program ini dapat terealisasi walaupun belum memenuhi target karena adanya komitmen dari Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Pekalongan dalam meningkatkan pelayanan dalam bidang perindustrian yang berkaitan dengan pendataan atau informasi data IKM di wilayah Kota Pekalongan dan pelayanan konsultasi serta informasi kepada para IKM baik melalui komunikasi verbal maupun proses digital yang mudah, efektif dan efisien. Program ini diwujudkan dalam pelaksanaan 1 (satu) kegiatan sebagai berikut :

- a. Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota.

Kegiatan ini diukur dengan indikator Persentase kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan target 30% realisasi



**DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
KOTA PEKALONGAN**

63,78% sehingga capaiannya 212,60%. Indikator ini tercapai karena didukung oleh 2 (dua) Sub Kegiatan yaitu :

- i. Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas);
- ii. Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas.

3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Pengukuran akuntabilitas, selain dilakukan melalui pengukuran kinerja sasaran, akuntabilitas juga dilihat dari realisasi anggaran, yang merupakan bagian dari Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP). Selama tahun 2024 pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Pekalongan dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekalongan. Pagu total belanja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Pekalongan Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 12.834.945.000,- dengan realisasi sampai dengan akhir tahun sebesar Rp. 11.580.574.743,- atau sebesar 90,23%. Sedangkan pagu belanja non gaji dan tunjangan sebesar Rp. 6.670.980.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 6.189.954.072,-. atau sebesar 92,79%. Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.12
Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2024

No	Urusan/Program/kegiatan/sub kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Anggaran Tahun 2024	
			Nominal (Rp.)	%
A	URUSAN KETENAGAKERJAAN			
I	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA			
a	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi.			
1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster	3,065,939,000	2.830.608.896	92



**DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
KOTA PEKALONGAN**

No	Urusan/Program/kegiatan/sub kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan Tahun 2023 (Rp)	Realisasi Anggaran Tahun 2023	
			Nominal (Rp.)	%
	Kompetensi			
2	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	249,999,000	238.586.332	95
3	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	235,461,000	194.690.500	83
b	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta			
3	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	67,214,000	61.865.000	92
c	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil			
4	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	79,126,000	77.412.704	98
d	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
5	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	26,831,000	25.472.500	95
II	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA			
e	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota			
6	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	18,750,000	18.747.800	100
7	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	32,072,000	32.071.900	100
8	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	8,625,000	8.484.000	98
9	Perluasan Kesempatan Kerja	304.586.000	217.887.200	72
f	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja			
10	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	31,140,000	31.121.863	100
11	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	110,500,000	102.494.800	93
12	Job Fair / Bursa Kerja	96,380,000	85.938.700	89
g	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota			
13	Peningkatan Pelindungan dan	28,130,000	24.643.200	88



**DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
KOTA PEKALONGAN**

No	Urusan/Program/kegiatan/sub Kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan Tahun 2023 (Rp)	Realisasi Anggaran Tahun 2023	
			Nominal (Rp.)	%
	Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) Pekerja Migran Indonesia (PMI)			
14	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	29,110,000	23.419.600	80
III	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL			
h	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			
15	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	19,150,000	16,336,000	85,31
16	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	11,184,000	11.010.000	98,44
17	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	383.723.000	372.508.000	97,07
i	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/ Kota			
18	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	11,534,000	11.478.800	99,52
19	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten Kota	6,240,000	6.229.900	99,84
20	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/ Serikat Buruh serta Non Afiliasi	15,258,000	15.257.000	100



**DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
KOTA PEKALONGAN**

No	Urusan/Program/kegiatan/sub Kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan Tahun 2023 (Rp)	Realisasi Anggaran Tahun 2023	
			Nominal (Rp.)	%
21	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	73,150,000	72.831.800	99,57
22	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	10,963,000	10,924,000	99,64
B	URUSAN PERINDUSTRIAN			
IV	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
j	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
23	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3,016,000	3,015,800	99,99
24	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2,132,000	2,132,000	100
25	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12,000,000	12,000,000	100
k	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
26	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6,163,965,000	5,390,620,671	87,45
27	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	51,400,000	51,249,900	99,71
28	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1,976,000	1.975.900	99,99
l	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
29	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	5,000,000	5.000.000	100
m	Administrasi Umum Perangkat Daerah			
30	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.250.000	4.250.000	100
31	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	135,873,000	116.628.000	85,84
32	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3,750,000	3,742,000	99,79
33	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	59,400,000	59,398,482	100
34	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7,000,000	7.000.000	100



**DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
KOTA PEKALONGAN**

No	Urusan/Program/kegiatan/sub kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan Tahun 2023 (Rp)	Realisasi Anggaran Tahun 2023	
			Nominal (Rp.)	%
35	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3,600,000	3.600.000	100
36	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.000.000	99,992,878	99,99
n	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
37	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2,400,000	2.399.800	99,99
38	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	260.500.000	256,108,381	98,31
39	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	362,328,000	361,500,448	99,77
o	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
40	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	98,300,000	96,715,560	98,39
41	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	180,000,000	179,999,914	100
42	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20,000,000	18,831,000	94,16
V	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI			
p	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota			
43	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	13,800,000	13.799.500	100
44	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	106,846,000	100.962.288	94,49
45	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	135,000,000	132,687,926	98,29
46	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	66,523,000	62,433,800	93,85
47	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	16,220,000	15.291.000	94,27



**DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
KOTA PEKALONGAN**

No	Urusan/Program/kegiatan/sub kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan Tahun 2023 (Rp)	Realisasi Anggaran Tahun 2023	
			Nominal (Rp.)	%
VI	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI			
q	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota			
48	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kab Kota	10,221,000	10,221,000	100
VII	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL			
r	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri			
49	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri Data Kawasan Industri Serta Data Lain Lingkup Kabupaten atau Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	90,000,000	74.618.000	82,91
50	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten Kota Melalui SIINas	4,380,000	4,380,000	100

3.4 PRESTASI YANG DIRAIH

Terkait dengan penghargaan yang pernah diraih oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Dinperinaker) Kota Pekalongan pada Tahun 2024 adalah berkaitan dengan prestasi beberapa ASN yaitu para instruktur UPTD BLK diantaranya adalah ASN atas nama :

1. **DUNUNG AJI PRASENO, ST** sebagai JUARA 2 Tingkat Nasional pada Kompetisi Keterampilan Instruktur Nasional IX Regional Wilayah Barat 2 Bidang Kompetisi : Instalasi Listrik (Elektrical Installation).



**DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
KOTA PEKALONGAN**

2. **TAUFIK NUR, S.Pd.** sebagai JUARA 2 Tingkat Nasional pada Kompetisi Keterampilan Instruktur Nasional IX Tahun 2024 Tingkat Nasional Bidang Kompetisi Pendingin dan Tata Udara.
3. **TAUFIK NUR, S.Pd** sebagai JUARA 1 Tingkat Nasional pada Kompetisi Keterampilan Instruktur Nasional IX Regional Wilayah Barat 2 Bidang Kompetisi : Pendingin dan Tata Udara (Refrigeration and AC).
4. **SUBEKTI, S.Pd.** sebagai JUARA 3 Tingkat Nasional pada Kompetisi Keterampilan Instruktur Nasional IX Regional Wilayah Barat 2 Bidang Kompetisi : Pelayanan Restoran (Restaurant Service).





DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
KOTA PEKALONGAN





**DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
KOTA PEKALONGAN**





DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KOTA PEKALONGAN

BAB IV P E N U T U P

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Pekalongan Tahun 2024 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Pekalongan Tahun 2024. Pembuatan LKjIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKjIP Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Pekalongan Tahun 2024 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Pekalongan dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2024 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Pekalongan menetapkan sebanyak 3 (tiga) sasaran dengan 3 (tiga) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator dengan capaian 100,6% atau interpretasi sangat baik.
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan capaian 108,66% atau interpretasi sangat baik.
- Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator dengan nilai n/a atau belum ada interpretasi.

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 3 (tiga) sasaran tersebut, secara umum telah sesuai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Dalam Tahun Anggaran 2024 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Pekalongan dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2024 sebesar **Rp. 12.834.945.000,-** sedangkan realisasi anggaran mencapai **Rp. 11.580.574.743,-** atau dengan serapan dana APBD mencapai **90,23%**, dengan demikian dapat dikatakan tahun 2024 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Pekalongan kondisi anggaran



DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KOTA PEKALONGAN

adalah Silpa **Rp. 1.254.370.257,-**.

Dalam kurun waktu 1 (satu) tahun tersebut telah menggunakan anggaran sebesar Rp. 11.580.574.743,- (Sebelas milyar lima ratus delapan puluh juta lima ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah) telah mewujudkan capaian kinerja untuk menunjang pencapaian Misi dan Visi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Pekalongan. Berdasarkan pagu anggaran tersebut maka realisasi anggaran yang telah digunakan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Pekalongan adalah 90,23% dari anggaran yang direncanakan, hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Pekalongan perlu dioptimalkan kembali agar lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Kota Pekalongan.

Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan oleh Dinperinaker untuk meningkatkan capaian kinerjanya tahun mendatang, diantara adalah :

1. Menjalin hubungan kerjasama yang lebih luas antarsektor maupun stakeholder baik dalam hal pelatihan kerja maupun penempatan alumni siswa pelatihan;
2. Perlunya teknologi lebih lanjut pada beberapa sektor program/ kegiatan;
3. Adanya upaya Sarana dan prasarana komunikasi harus memadai;
4. Mengusahakan adanya bantuan alat dan modal bagi peserta pelatihan kerja dan masyarakat yang akan berwirausaha pasca pelatihan;
5. Peningkatan koordinasi dengan perusahaan dan BKK dalam rangka kegiatan Job Fair untuk meningkatkan angka penempatan sehingga pengangguran dapat ditekan.
6. Melakukan kegiatan pada awal tahun sehingga dapat melakukan evaluasi dalam kegiatan sosialisasi penempatan tenaga kerja Indonesia.
7. Optimalisasi pelaksanaan kegiatan yang sudah ditetapkan sesuai dengan Daftar Penetapan Anggaran dan Rencana Anggaran Kas.
8. Melakukan pengawasan melekat pada staf agar dapat melakukan tugas yang diberikan secara efektif dan efisien.
9. Perlu dilakukan evaluasi kegiatan agar selaras dan relevan dengan program dan sasaran jangka menengah perangkat daerah yang akan dicapai.
10. Perlu dievaluasi schedule kegiatan agar tidak terjadi penumpukan pelaksanaan kegiatan pada triwulan tertentu sehingga tidak menyulitkan pelaporan pertanggungjawabannya.



**DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
KOTA PEKALONGAN**

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Pekalongan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Pekalongan kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Pekalongan.

Pekalongan, 12 Februari 2025

**KEPALA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
KOTA PEKALONGAN**



BETTY DAHLANI DAHLAN, S.T.

Perempuan Utama Muda
NIP. 19690203 199803 2 004



LAMPIRAN



**DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
KOTA PEKALONGAN**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA**

- 1 Nama OPD : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
- 2 Tugas : Membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Perindustrian dan Tenaga Kerja.
- 3 Fungsi :
 - a. perumusan dan penetapan sasaran, program bidang Perindustrian dan Ketenagakerjaan;
 - b. perumusan kebijakan bidang Perindustrian dan Ketenagakerjaan;
 - c. pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang kesekretariatan;
 - d. pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang penempatan kerja, pelatihan dan produktivitas;
 - e. pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang perindustrian;
 - f. pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang hubungan industrial dan jaminan sosial;
 - g. pengarah dan pengoordinasian pelaksanaan dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (SP);
 - h. pengoordinasian pengendalian, pengawasan, pembinaan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan tugas; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI PENGHITUNGAN	SATUAN	TARGET					SUMBER DATA
					2022	2023	2024	2025	2026	
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	Nilai Evaluasi AKIP OPD tahun N	Indeks	71,50	73,00	74,50	76,00	77,50	Inspektorat
2	Meningkatnya Jumlah Tenaga Kerja Siap Pakai yang ditempatkan	Persentase tenaga siap pakai yang ditempatkan	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam Wilayah Kab/Kota.	Persen	52,22	52,26	52,29	52,33	52,36	Dinperinaker
3	Meningkatnya Pertumbuhan Industri	Pertumbuhan Industri	Pertumbuhan Industri di Kota Pekalongan tahun N	Persen	0,099	0,085	0,085	0,085	0,071	Dinperinaker

Pekalongan, 3 Januari 2024
Pit. Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja


ARIF KARYADI, S.Sos.
Pembina Tingkat I
NIP. 19711017 199903 1 007



**DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
KOTA PEKALONGAN**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA PERUBAHAN (IKU PERUBAHAN)
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Pekalongan Tahun 2021-2026**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Formulasi	Tipe Indikator	Kondisi Awal	Target						Sumber Data	Penanggung Jawab
							2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP OPD	Indeks	Penghitungan Nilai SAKIP Tahun N yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kota Pekalongan	Data Terakhir/ Semakin Tinggi Semakin Baik / 1	70,00	70,00	71,50	73,00	75,00	75,25	75,50	Inspektorat Daerah	Dinperinaker
2	Meningkatnya Jumlah Tenaga Kerja Siap Pakai yang ditempatkan	Persentase tenaga siap pakai yang ditempatkan	Persen	Tenaga Kerja Hasil Pelatihan Tahun N-1 yang Bekerja pada Tahun N / Peserta Pelatihan pada Tahun N-1 * 100%	Akumulasi Tiap Triwulan/ Semakin Tinggi Semakin Baik / 100	52,17	52,17	52,22	52,26	52,29	52,33	52,36	Dinperinaker	Dinperinaker
3	Meningkatnya Pertumbuhan Industri	Pertumbuhan Industri	Persen	Pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan tahun n (data dari BPS)	Data Terakhir/ Semakin Tinggi Semakin Baik / 1	-0,255	-0,26	0,099	0,085	2,30	2,30	2,30	Dinperinaker	Dinperinaker

Pekalongan, 9 Desember 2024
Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Kota Pekalongan

BETTY DAHFIANI DAHLAN, S.T.
Perbina Utama Muda
NIP. 19690203 199803 2 004



**DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
KOTA PEKALONGAN**



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **BETTY DAHFIANI DAHLAN, S.T.**

Jabatan : **Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Kota Pekalongan**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **H. ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID, S.E.**

Jabatan : **Walikota Pekalongan**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pekalongan, 09 Desember 2024

Pihak Kedua,

Walikota Pekalongan



H. ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID, S.E.

Pihak Pertama,

**Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga
Kerja Kota Pekalongan**

**BETTY DAHFIANI DAHLAN, S.T.
NIP. 19690203 199803 2 004**



**DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
KOTA PEKALONGAN**

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN TAHUN 2024

Unit Kerja: DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KOTA PEKALONGAN

No.	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Keterangan
Tujuan :				
1	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	80,47 indeks	Formulasi : IKM Tahun N Tipe capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber data : Bag. Organisasi
2	Meningkatnya SDM yang Kompeten dan Produktif	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	74,22 persen	Formulasi : Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja tahun N Tipe capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber data : BPS
3	Meningkatnya Kontribusi Perindustrian Terhadap Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan	Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan	3,32 persen	Formulasi : Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan tahun N Tipe capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber data : BPS



**DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
KOTA PEKALONGAN**

No.	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Keterangan
Sasaran :				
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	74,50 indeks	Formulasi : Nilai SAKIP Tahun N Tipe capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber data : Inspektorat
2	Meningkatnya Jumlah Tenaga Kerja Siap Pakai yang ditempatkan	Persentase tenaga siap pakai yang ditempatkan	52,29 persen	Formulasi : Persentase tenaga siap pakai yang ditempatkan Tipe capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber data : Dinperinaker
3	Meningkatnya pertumbuhan industri	Pertumbuhan Industri	2,3 persen	Formulasi : Pertumbuhan Industri tahun N Tipe capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber data : BPS



**DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
KOTA PEKALONGAN**

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp. 3.724.570.000	APBD-P, DBHCHT
2. Program Penempatan Tenaga Kerja	Rp. 659.293.000	APBD-P
3. Program Hubungan Industrial	Rp. 531.202.000	APBD-P
4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 7.476.890.000	APBD-P
5. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Rp. 338.389.000	APBD-P
6. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Rp. 10.221.000	APBD-P
7. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Rp. 94.380.000	APBD-P
TOTAL	Rp. 12.834.945.000	

Pekalongan, 09 Desember 2024


Walikota Pekalongan
H. ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID, S.E.

**Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Kota Pekalongan**


BETTY DAHFIANI DAHLAN, S.T.
NIP. 19690203 199803 2 004